

ABSTRAK

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, maka kebutuhan energipun semakin meningkat. Meski banyak upaya untuk meningkatkan kegunaan dari berbagai sumber energi, namun Indonesia terlalu mengandalkan batubara sebagai sumber energi. Dengan merosotnya cadangan batubara, pemerintah kemudian melirik ke sumber energi yang dapat diperbaharui, yaitu energi nuklir. Keuntungan menggunakan nuklir sebagai sumber energi sama besarnya dengan risiko yang dapat ditimbulkan. Untuk melindungi penggunaan energi nuklir dan lingkungan, pemerintah Republik Indonesia telah mengupayakan dan membentuk peraturan perundang-undangan yang didasari oleh hukum internasional mengenai penggunaan bahan nuklir dan protokol dari International Atomic Energy Association. Bentuk peraturan perundang-undangan yang telah ada hanyalah mengenai keselamatan dan perlindungan penggunaan nuklir. Sedangkan peraturan perundang-undangan mengenai keamanan penggunaan nuklir sampai pada tahun 2016 ini hanyalah sampai pada wujud Rancangan Undang-Undang. Urgensi dari peraturan perundang-undangan ini sangat dibutuhkan dikarenakan akan dimulainya konstruksi reaktor nuklir pertama di Indonesia dan dikarenakan tidak adanya peraturan perundang-undangan apapun mengenai keamanan nuklir di Indonesia. Sehingga pada Skripsi ini akan membahas mengenai kelayakan rancangan undang-undang tentang keamanan nuklir yang telah mengikuti standar peraturan hukum internasional dan protokol International Atomic Energy Association dan membandingkannya dengan peraturan perundang-undangan negara lain yaitu peraturan perundang-undangan keamanan nuklir Korea Selatan. Perbandingan ini dilakukan dengan negara Asia lain yang telah terbukti keberhasilannya dalam menggunakan tenaga nuklir sebagai sumber energi dan mengembangkan berbagai teknologi nuklir. Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber bahan nuklir yang besar dan dengan akan dimulainya pembangunan reaktor nuklir pertama, haruslah memiliki dasar hukum yang kuat untuk dapat menjadi sebuah perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dan untuk dapat memiliki landasan hukum yang kuat sebagai langkah preventif untuk kasus-kasus tentang keamanan nuklir.

Kata Kunci: keamanan nuklir, rancangan undang-undang keamanan nuklir, perbandingan peraturan perundang-undangan.

ABSTRACT

Along with the increasing number of population in Indonesia, then the need for energy is increasing as well. Despite a lot of effort to improve the usability of various sources of energy, but Indonesia is relying too heavily on coal as an energy source. Due to depleting coal reserves, government then glances to other sources of renewable energy, namely nuclear energy. The benefit of using nuclear as source of energy is as equally great as its risk. In order to protect the use of nuclear energy and the environment, Indonesian government has been preparing sets of rules and regulations complying with International Law instruments, regarding the use of Nuclear and the International Atomic Energy Association protocols. As National Acts regarding safety and safeguards has been established, thus Indonesian Government plans on another Act regarding the security of nuclear materials and facilities. The latest progress until 2016 is a Draft of Nuclear Security Act that has been made. The urgency of the regulation is needed due to the construction of the first nuclear power reactor in Indonesia is soon to be started and the absence nuclear security regulation in Indonesia. This paper discusses and analyses about the Indonesian Nuclear Security Act draft and measures whether or not it is sufficient with international regime on nuclear security. As an addition, this paper also compares the Indonesian Nuclear Security Act draft to the South Korea's nuclear security acts and enforcement regulations. It is used as a comparison with another Asian country which has proven its success in using nuclear power as its energy source and developing various nuclear technologies. Indonesia has a great source of nuclear material and with the commencement of construction of the first nuclear power reactor; Indonesia must have a strong legal basis to be able to become a legal protection for all parties involved and to have a strong legal foundation as a preventive measure for cases of nuclear security.

Keywords: nuclear security, draft act on nuclear security, comparative regulation.